



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
**UNIT KERJA** : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : JUL HERRY SIBURIAN
2. Jabatan : KEPALA RUMAH TAHANAN
3. NHK : 812131

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.002.188.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m<sup>2</sup>/91 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , WARISAN Rp. 1.801.300.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 16 m<sup>2</sup>/24 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA DELI SERDANG, WARISAN Rp. 200.888.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 465.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. MOBIL, CHRYSLER CHEROKEE GRAND 4.0 LTD / JEEP Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 873.136.387

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 3.340.324.387

**III. HUTANG** Rp. 744.769.616

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.595.554.771

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
**UNIT KERJA** : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUYATMIRAH**
2. Jabatan : **BENDAHARA DAN/ATAU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN**
3. NHK : **507672**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 612.000.000

1. Tanah Seluas 564 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 192 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 52.000.000
3. Tanah Seluas 144 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 71.500.000

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS / MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 68.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR / SOLO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.700.000
3. MOTOR, HONDA GL200 R / SOLO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 800.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 5.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 83.375.911**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 771.875.911

**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 771.875.911

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
**UNIT KERJA** : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUDARYONO**
2. Jabatan : **BENDAHARA DAN/ATAU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN**
3. NHK : **796951**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **60.000.000**

1. Tanah Seluas 1350 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 60.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **29.200.000**

1. MOTOR, HONDA C86 CLOB Tahun 1986, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000
2. MOTOR, HONDA GL 200 R Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
3. MOTOR, HONDA C1C02N16M2 AT/SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **----**

**D. SURAT BERHARGA** Rp. **----**

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **178.153.672**

**F. HARTA LAINNYA** Rp. **----**

**Sub Total** Rp. **267.353.672**

**III. HUTANG** Rp. **----**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **267.353.672**

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.